

SIPNOSIS

Pembangunan merupakan sebuah tolak ukur dari Negara dalam kesejahteraan masyarakat, pembangunan di sebuah Negara diawali dengan pembangunan pada titik terendah yakni, tingkat Desa, sehingga dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Desa dalam membangun pembangunan menjadi salah satu hal yang penting. seperti Di Desa Kumpai Batu Bawah yang sebagai penerima alokasi dana desa untuk melaksanakan pembangunan desanya, Pembangunan Infrastruktur Desa Kumpai Batu Bawah memerlukan masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan maka pembangunannya dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan kualitatif. Adapun narasumber dalam penelitian ini di antaranya adalah Aparatur Pemerintah Desa Kumpai Batu Bawah, Masyarakat Desa, Ketua Rt Desa Kumpai Batu Bawah. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan metode observasi. sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa kumpai batu bawah melibatkan masyarakat yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari sebuah pembangunan. Partisipasi masyarakat menentukan keberlangsungan dan kualitas sebuah pembangunan infrastruktur secara gotong royong. Dimana masyarakat membaaur menjadi satu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur desa kumpai batu bawah sebagai pemerataan pembangunan sesuai dengan fungsi alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar pembangunan infrastruktur Desa Kumpai Batu Bawah yang telah terlaksana pada Tahun 2016 mendapatkan perawatan dari pemerintah desa, agar infrastruktur tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur lebih diminimalisir lagi.

